

**TRANSFORMASI *CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY* (CSR) UNTUK MEMBANGUN  
KEKUATAN DAN KEMANDIRIAN *CIVIL SOCIETY*  
DI INDONESIA**



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
BADAN HUKUM MILIK NEGARA**

**Pidato**

Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar  
dalam Bidang Sosiologi Pembangunan  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga  
di Surabaya pada Hari Sabtu, Tanggal 16 Mei 2009

Oleh

**MUSTA'IN**

Buku ini khusus dicetak dan diperbanyak untuk acara  
Pengukuhan Guru Besar di Universitas Airlangga  
Tanggal 16 Mei 2009

**Dicetak:** Airlangga University Press  
Isi di luar tanggung jawab AUP

*Dipersesembahkan  
Untuk kemaslahatan segenap warga bangsa,  
Almamater Fisip Unair,  
Orang tua,  
Mertua,  
Istri  
  
dan*

*Khususnya untuk ananda  
Sarwi Ruci dan Hudan Fu'adilah (alm),  
Ahmad Firmasyah  
Para guru,  
Ulama, Kyai, sesepuh dan pinisepuh,  
Para kolega  
dan  
Saudara-saudaraku*



*Yang terhormat,*

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Amanat Universitas  
Airlangga,

Ketua, Sekretaris, Para Ketua Komisi dan Anggota Senat Akademik  
Universitas Airlangga,

Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Airlangga,

Para Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga,

Para Pimpinan Lembaga dan UPT di Lingkungan Universitas  
Airlangga,

Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Guru Besar Tamu,

Para Dosen dan Sivitas Akademika Universitas Airlangga dan Para  
Hadirin yang berbahagia,

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Berkat limpahan rahmat dan kasih Allah swt, *bi qouli* Alhamdulillahirobbil'alamin, saya berdiri di hadapan sidang Rapat Senat Terbuka yang terhormat ini, untuk menyampaikan Pidato Pengukuhan saya sebagai Guru Besar di bidang Sosiologi Pembangunan (*Sociology of Development*), dengan judul:

**TRANSFORMASI CSR (*CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY*) UNTUK MEMBANGUN  
KEKUATAN DAN KEMANDIRIAN *CIVIL SOCIETY*  
DI INDONESIA**

*Para hadirian yang saya hormati,*

Dalam sejarah politik kenegaraan dan pembangunan, peran negara dan tujuan pembangunan, baik secara teoritik maupun implementatif, tidak selalu signifikan dengan meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Negara dalam banyak

kasus justru menjadi problematik bagi masyarakat. Demikian halnya dengan pembangunan yang dilakukan acapkali justru mengakibatkan warga masyarakat termarginalkan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan peran negara yang semakin terbatas dan seiring dengan kian menguatnya posisi dan peran sektor industri, maka program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat menjadi instrumen alternatif untuk kemajuan dan kemandirian masyarakat, meski dalam implementasinya di Indonesia perlu *transformasi* (*hibridasi*).

Paling tidak terdapat 3 kata kunci (*key words*) dalam pidato saya ini, yaitu **pembangunan**, **CSR**, dan **Civil Society**. Pembangunan dimaksudkan untuk meningkatnya kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui proses penguatan berdasar potensi warga masyarakat. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab sosial industri (*corporate*) terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya warga masyarakat yang terkena dampak langsung akibat aktivitas industri melalui metodologi *community development*. Sedangkan *Civil society* adalah terbangunnya mekanisme kehidupan sosial yang mengedepankan semangat kebersamaan, demokrasi dan kemandirian.

Oleh karena itu, fokus pidato ini didasarkan pada kerangka berpikir bahwa dengan program CSR yang bermetodologi *community development*, selain akan menguntungkan masyarakat maupun industri, juga akan menjadi instrumen strategis atas terbangunnya *civil society* di Indonesia.

*Hadirin yang saya hormati,*

## **Pembangunan**

Pembangunan secara normatif dimaksudkan untuk melakukan perubahan kehidupan masyarakat dari kondisi yang kurang baik, kurang maju menjadi lebih baik, maju dan sejahtera. Namun, tujuan

pembangunan seperti itu sering kali tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Hasil pembangunan sering kali berdampak negatif dan problematik bagi sebagian besar masyarakat. Meski diakui dalam beberapa hal pembangunan telah membawa dampak positif seperti kemajuan dan kemodernan, namun tidak sedikit pula persoalan dan permasalahan sosial muncul yang diakibatkan pembangunan.

Kata "pembangunan" (*development*) mulai menjadi isu dunia, khususnya bagi negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka pasca Perang Dunia II. Konsep pembangunan yang banyak diidentikkan dengan (teori) modernisasi diintroduksi ke negara-negara bekas jajahan yang baru merdeka tersebut berlangsung antara 1940-an dan 1950-an. Teori modernisasi menjadi arus utama (*mainstream*) pembangunan dengan 4 (empat) isu sentral, yaitu: (i) pertumbuhan, (ii) akumulasi kapital, (iii) transformasi struktural, dan (iv) peran pemerintah. Keempat isu ini kemudian menjadi isu dasar dan menjadi kajian penting dalam evolusi pemikiran pembangunan generasi pertama (1950–1975).

Secara teoretis, program pembangunan melalui modernisasi yang berorientasi pertumbuhan dinilai baik apabila ada peningkatan pendapatan per kapita seperti tercermin pada *Growth Nasional Product* (GNP). Namun, GNP hanya akan meningkat jika ada investasi. Investasi mensyaratkan adanya industrialisasi. Logika berpikir modernisasi ini seiring dengan teoretisi pembangunan mazhab ekonomi neoklasik dan strukturalis sebagaimana dikatakan Paul Rosestein-Rodan (1944), Ragnar Nurkse (1952), Arthur Lewis (1955), dan Irma Adelman (1961) bahwa "*capital accumulation, investment, and well-designed industrialization are the very crucial components to accelerate development.*" Ketiga hal tersebut merupakan pendorong utama dalam menggerakkan transformasi struktural yang memungkinkan terjadinya lompatan pembangunan (dari pertanian ke industri).

Model pembangunan modernisasi seperti itu mensyaratkan peranan negara yang besar sehingga wajar kalau kemudian negara (pemerintah) yang menjadi pelaku utama sekaligus manajer pembangunan. Begitu besarnya ikut campur negara yang dalam kenyataannya tidak hanya berurusan dengan perencanaan program pembangunan, rekayasa sosial ekonomi, manajemen dan administrasi, regulasi, namun hingga memasuki urusan-urusan privat seperti urusan agama sampai pilihan konstrasepsi.

Sentralnya peran negara dalam pembangunan menuai kritik dari pemikiran neo liberal yang justru menekankan pentingnya (a) deregulasi, (b) privatisasi, dan (c) liberalisasi. Asumsinya, dengan deregulasi dan debirokratisasi akan mendorong perkembangan ekonomi yang efisien dan membangun iklim pasar yang sehat. Friederich Hayek (1899–1999), salah satu tokoh utama neoliberal dan pemenang Nobel Ekonomi 1974, menyatakan bahwa mekanisme pasar merupakan instrumen yang sangat efektif dalam menggerakkan persaingan, sekaligus menjadi kekuatan pemaksa bagi para pelakunya agar berupaya menawarkan produk dan barang dengan harga kompetitif.

Memang, paradigma modernisasi telah menciptakan perubahan penting dalam kehidupan bangsa ini. Pembangunan telah mengantarkan bangsa ini memasuki tahapan modernisasi menuju kehidupan yang lebih maju dan modern. Namun, paradigma pembangunan yang dirumuskan oleh generasi pembangunan pertama ini telah mengakibatkan ketimpangan dan kesenjangan yang mencolok antarkelompok masyarakat dan membelenggu kebebasan manusia yang paling asasi. Kritik ini diapresiasi dengan sangat baik oleh para pemikir pembangunan generasi kedua (seperti Sen, 1999; Przeworski & Alvarez; 2000; dan Meier & Stiglitz, 2002) sejak 1975-sekarang). Para pemikir generasi kedua ini lebih melihat isu dasar pembangunan harus didasarkan pada faktor distribusi pendapatan, ketidakadilan, kemiskinan, kebebasan, dan demokrasi.

Sejak itu, kata pembangunan mulai ditinggalkan, kemudian diganti dengan konsep baru, yakni globalisasi, suatu pemikiran yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak harus dengan *substitusi import*, melainkan dengan produksi berorientasi ekspor. Globalisasi ekonomi yang *masif* dan *intens* telah menyebabkan kian terintegrasinya aktivitas ekonomi antarnegara (*borderless economy*). Indikatornya adalah (i) liberalisasi ekonomi dan intensifikasi perdagangan bebas antar negara, (ii) meluasnya operasi perusahaan multinasional, dan (iii) pesatnya perkembangan bisnis finansial internasional (Gilpin, 2001). Ketiga faktor ini telah mempengaruhi premis dasar dan preposisi teoretis dalam perkembangan ilmu ekonomi mutakhir, yakni paradigma pembangunan manusia (*human development paradigm*).

Sebenarnya, kritik terhadap berbagai paradigma pembangunan itu sudah mulai muncul sejak akhir 1960-an, ketika Dudley Seers dalam *The Meaning of Development* (1969) menggugat apa yang disebut "*the growth fetishism of development theory*." Bagi Seers, makna paling hakiki pembangunan itu bukan semata-mata peningkatan pendapatan per kapita (GNP), melainkan pemerataan distribusi pendapatan, penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan, dan penghapusan ketidakadilan. Keempat isu ini jauh lebih mendasar dan menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan sehingga harus diselesaikan melalui proses pembangunan.

Globalisasi, sebagai paradigma baru pembangunan mulai muncul tahun 1980-an dan berkembang 1990-an dengan ditandai fenomenal "ekonomi baru" -nya Amerika Serikat dan negara-negara Asia Timur sebagai macan perekonomian dunia. Namun, lagi-lagi, gebyar kesuksesan globalisasi itu berubah menjadi noda dan nestapa dengan terjadinya krisis keuangan tahun 1997 di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur (kemudian menyebar ke Rusia dan Brazil) hingga memporakporandakan perekonomian negara.

Para pemikir pembangunan generasi kedua bahkan bergerak lebih maju lagi dengan mengusung isu kebebasan dan demokrasi. Isu ini sejak awal mulai disuarakan oleh ahli-ahli sosiologi, politik, dan ekonomi yang menaruh perhatian besar pada isu pembangunan dan perkembangan demokrasi politik (Lipset 1959, Diamond & Linz 1995, Amartya Sen 1999, Przeworski & Alvarez 2000, dan Meier & Stiglitz 2002). Mereka berpendapat bahwa, selain pertumbuhan, peningkatan pendapatan nasional, dan akumulasi kapital, pembangunan harus mampu mengantarkan suatu bangsa mencapai kehidupan politik yang bebas dan demokratis, yang tercermin pada adanya pengakuan apa yang disebut *civil rights and political liberty*. Semua itu diperlukan untuk menjamin keamanan sosial dan memelihara stabilitas politik. Pemenang Nobel Ekonomi tahun 1998, Amartya Sen, merangkum para teoritis itu dengan rumusan: "*development requires the removal of major sources of unfreedom: poverty as well as tyranny, poor economic opportunities as well as systematic social deprivation, neglect of public facilities as well as intolerance or overactivity of repressive states.*"

*Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara yang saya hormati,*

## **Pembangunan di Indonesia**

Secara formal rujukan pembangunan Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal ini secara jelas disebutkan bahwa *negara menguasai seluruh kekayaan yang terkandung dalam bumi, laut dan udara demi kesejahteraan sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia*. Dalam kenyataannya acuan resmi ini menjadi bergeser setidaknya karena dua sebab: *pertama*, adanya tekanan dari pemberi bantuan dana asing, dan *kedua*, adanya penyalahgunaan kekuasaan sehingga memunculkan praktek-praktek inkonstitusional

Faktor pertama terjadi ketika Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan dimulainya pembangunan negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) pada 1950-an. Sejak itu berbagai model

pembangunan ditawarkan dan kemudian diterapkan begitu saja ke negara-negara dunia ketiga. Indonesia sendiri telah menerapkan banyak program pembangunan secara berganti-ganti,<sup>1</sup> namun signifikansinya banyak dipertanyakan.

Kegagalan pembangunan di Indonesia dari bantuan dana asing diantaranya disebabkan oleh *transplantasi* model pembangunan barat tanpa mempertimbangkan kondisi lokalitas Indonesia. Misalnya kebijakan swastanisasi (*privatisasi*). Untuk memperlancar swastanisasi pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi, ketertiban politik, stabilitas dan keamanan nasional. Selain itu, pemerintah juga menerapkan 2 strategi umum: *pertama*, strategi ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan cepat dan mampu memobilisasi berbagai sumber daya ekonomi dari luar negeri berupa strategi berorientasi keluar. *Kedua*, strategi politik yang mendorong penciptaan sistem ekonomi dan masyarakat yang terkendali.

Strategi pertama dapat dilakukan jika kelompok swasta dapat berperan secara profesional. Namun, konglomerat Indonesia bukanlah seperti itu, melainkan konglomerat hasil praktek-praktek *nepotisme*; karbitan dan tidak profesional. Jenis konglomerat seperti ini oleh Kuno (1988) disebutnya sebagai *ersatz capitalists* suatu konglomerat yang oleh Lukman Sutrisno (1992) dinilai sebagai penyebab kegagalan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dalam rangka mempercepat pembangunan, pemerintah membangun *koalisi* yang sangat kuat dari perencana pembangunan (teknokrat) penyedia dana (investor dan bantuan dana asing), pelaksana (bisnis lokal dan internasional yang didukung oleh birokrasi nasional), penjamin ketertiban dan keamanan (tentara) dan

---

<sup>1</sup> Secara umum paling tidak ada tiga model pemikiran dan praktek pembangunan Indonesia yang masing-masing menekankan pendekatan yang berbeda, yaitu: Politik sebagai primadona (PSP), Ekonomi Sebagai Primadona (ESP) dan Moral Sebagai Primadona (MSP). Sejarah perkembangan kebijakan pembangunan di Indonesia sejak Orde Baru pada dasarnya adalah sejarah persaingan walau ada juga kecenderungan perkawinan—antara pendukung ketiga pendekatan tersebut, terutama PSP dan ESP.

membentuk kelompok-kelompok *korporatis*<sup>2</sup>. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan **birokrasi kembar** dengan menempatkan kelompok sipil dan militer ke dalam semua lapisan birokrasi negara, suatu konsep yang tidak pernah dikenal dalam perspektif *Weberian*.

Pilihan pembangunan Indonesia tersebut harus diakui selain berhasil meningkatkan PDB ke tingkat rata-rata 9,4% selama Pelita I (Mochtar, 1994), juga mampu mengangkat ekonomi Indonesia ke puncak pertumbuhannya. Misalnya, nilai manufaktur telah tumbuh secara konstan pada rata-rata 15% sejak tahun 1970-an dan kontribusi nilai manufaktur terhadap GDP meningkat 11,6% di tahun 1980-an. (Poot, Kenvenhoven dan Jansen, 1990).

Namun, pilihan kebijakan pembangunan berorientasi pertumbuhan tersebut telah membawa sejumlah kemudharatan, misalnya kondisi buruh semakin tereksplorasi di pabrik-pabrik: upah rendah, kondisi kerja jelek, tiadanya keselamatan kerja, pemaksaan kerja melebihi ketentuan jam kerja tanpa dinilai sebagai kerja lembur, mudahnya pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengekangan hak berorganisasi buruh. Deyo (1987), menggambarkan industrialisasi di negeri-negeri industri baru (NIB) di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dicirikan oleh penyingkiran politik kaum buruh.

Tetapi sejumlah kebijakan yang mengarah pada menguatnya peran negara tersebut telah menenggelamkan optimisme para teoritis lain terhadap kekuatan masyarakat dalam pembangunan. Kekuatan masyarakat dalam prosesnya tergeser dan termarginalisasi oleh kekuatan negara. Negara mempunyai kekuasaan otonomi sangat besar dan aktif menjadi manajer dalam berbagai kegiatan

---

<sup>2</sup> Menurut Schmitter (1974) korporatisme didefinisikan sebagai "suatu" sistem perwakilan kepentingan dimana unit-unit yang membentuknya diatur dalam organisasi-organisasi yang jumlahnya terbatas dan bersifat tunggal, mewajibkan keanggotaan, tidak saling bersaing, ditata secara hirarkhis dan dibedakan menurut fungsinya; yang diakui atau diizinkan (kalau bukan diciptakan sendiri) oleh negara dan diberi hak monopoli untuk mewakili kepentingan dalam bidangnya masing-masing sebagai imbalan atas kesediaannya mematuhi pengendalian pemerintah dalam hal pemilihan pemimpin dan dalam artikulasi tuntutan dan dukungan.

masyarakat baik sosial, ekonomi dan kebudayaan di samping fungsi utamanya dalam bidang keamanan dan politik. Begitu besarnya kekuatan negara (dan arogansi birokrasi) sempat digambarkan dengan sangat jelas oleh menteri dalam negeri awal tahun 1980-an bahwa peran rakyat dalam pembangunan hanya 12% (Mochtar, 1994).

Idiologi *pembangunanisme* Orde Baru yang mengedepankan model pembangunan berorientasi pertumbuhan (*developmentalism*) mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Model pembangunan kapitalisme seperti itu sangat tidak adil karena berakibat terhadap meluasnya eksploitasi terhadap masyarakat miskin. Berbagai alternatif kemudian muncul. Misalnya "pendekatan kebutuhan dasar" yang dikembangkan oleh Hollins Chenery (1974) untuk mengembangkan strategi baru yang disebut *redistribution-with-growth*.

Dampak negatif idiologi *pembangunanisme* dalam prosesnya banyak melahirkan lembaga-lembaga nonprofit yang lebih mengedepankan dimensi moral. Kelompok-kelompok inilah yang sejak tahun 1970-an dikenal dengan *Non Government Organization* (NGO) yang kemudian kita kenal dengan *Lembaga Swadaya Masyarakat* (LSM). Sejak kurun waktu itulah pendekatan Moral Sebagai Primadona (MSP) mulai marak.

*Hadirin yang saya hormati,*

### **Pembangunan *People Oriented***

Teori-teori pembangunan berparadigma positivis (*developmentalism*) yang mengedepankan pertumbuhan, berorientasi materi dan yang mengukur hasil pembangunan hanya dari aspek fisik dan dikuantifikasi secara statistik, menjadikan deretan simbol-simbol numerikal dalam tabel dan grafik sebagai simbol kesuksesan pembangunan telah memperlihatkan *kemudharatannya* bagi kehidupan masyarakat.

Mahbub ul Haq dalam bukunya *Reflections on Human Development* (1995) menyatakan perlunya perubahan paradigma pembangunan dari "*national income accounting*" ke "*people-centered policy*." Perubahan paradigma yang ia maksudkan adalah *is concerned both with building up human capabilities through investment in people and with using those human capabilities fully through an enabling framework for growth and employment.*"

Paradigma *people-oriented* ini setidaknya mempunyai 4 (empat) unsur yang harus diperhatikan. *Pertama*, kesetaraan dan kesamaan warga masyarakat dalam memperoleh akses ke sumber daya ekonomi dan politik. Untuk itu, diperlukan: (i) keadilan distribusi aset-aset ekonomi produktif; (ii) perbaikan sistem perbankan yang memungkinkan bagi warga menengah ke bawah dapat mengakses untuk mengembangkan usahanya; (iii) menciptakan sistem bermasyarakat yang demokratis dan; (iv) distribusi pendapatan melalui perbaikan kebijakan fiskal; (v) menata sistem hukum guna menjamin tegaknya keadilan.

*Kedua*, pemberdayaan yang diarahkan pada pembangunan kapasitas masyarakat dengan cara melakukan transformasi potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kemandirian, otonomi, dan otoritas dalam melaksanakan pekerjaan dan dalam mengatasi permasalahan sosial. Dalam konteks ini, pembangunan berarti menempatkan manusia sebagai subyek dan pusat perhatian yang bertujuan bukan saja meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan, melainkan juga memperluas pilihan-pilihan publik (*public choices*) sehingga manusia mempunyai peluang mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya. *Ketiga*, produktivitas sebagai hasil dari perencanaan program peningkatan ekonomi dan SDM, infrastruktur, dan finansial guna mendukung pertumbuhan ekonomi, yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*Keempat*, keberkelanjutan (*sustainability*), dalam arti kemampuan memilih, mengelola dan merawat modal pembangunan: fisik,

manusia, finansial, dan lingkungan agar bisa dimanfaatkan guna mencapai tujuan utama pembangunan, yakni kesejahteraan rakyat. Untuk itu, penyegaran, pembaruan, dan pelestarian modal pembangunan sangat penting dan perlu guna menjaga kesinambungan proses pembangunan di masa depan.

Paradigma pembangunan berfokus manusia itu kini menjadi tema sentral dalam wacana perdebatan mengenai isu-isu pembangunan. Orientasi pembangunan pun bergeser dari tujuan makro ekonomi ke upaya memantapkan pembangunan sosial (*societal development*). Paling tidak ada enam alasan mengapa paradigma pembangunan manusia ini dinilai penting, yaitu: (a) pembangunan bertujuan akhir meningkatkan harkat dan martabat manusia; (b) mengembangkan misi pemberantasan kemiskinan; (c) mendorong peningkatan produktivitas secara maksimal dan meningkatkan kontrol atas barang dan jasa; (d) memelihara konservasi alam (lingkungan) dan menjaga keseimbangan ekosistem; (e) memperkuat basis civil society dan institusi politik guna mengembangkan demokrasi; dan (f) merawat stabilitas sosial politik yang kondusif bagi implementasi pembangunan (Kaushik Basu, *On the Goals of Development*, 2002).

*Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara yang saya hormati,*

## **CSR**

Meski CSR tidak asing lagi di negara Eropa dan Amerika, namun *Corporate Social Responsibility* (CSR) baru menjadi perhatian serius sejak beberapa tahun terakhir karena beberapa sebab; misalnya, dinamika sosial masyarakat yang semakin tinggi akibat demokratisasi sejak reformasi 1997, meningkatnya tuntutan masyarakat atas keadilan sosial, maraknya persoalan lingkungan hidup dan kian banyak pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, masyarakat juga semakin mengerti dan penasaran ketika berlangsung polemik atas dimasukkannya CSR dalam revisi UU Perseroan Terbatas No 1/1995, yang antara lain mewajibkan

dilakukannya CSR bagi setiap industri, khususnya industri yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam (SDA).

CSR, menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, berikut komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. CSR merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk di dalamnya adalah pelanggan atau *customer*, karyawan, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, *supplier*, bahkan juga kompetitor.

Tanggung jawab perusahaan (CSR) merupakan suatu komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas (*community well-being*) melalui diskresi-diskresi praktek-praktek bisnis dan kontribusi-kontribusi sumber-sumber perusahaan bagi masyarakat. Konsep 'diskresi' disini merujuk pada komitmen sukarela (*voluntary commitment*) bisnis yang dapat memberikan kontribusi-kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. *CSR is concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or in a socially responsible manner* (Hopkins, 2003).

CSR adalah kepedulian organisasi bisnis dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal (Schermenhorn (1993). CSR, merupakan pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosialnya dalam aktifitas bisnis mereka dan dalam interaksi sosialnya dengan para pemangku kepentingan (Nuryana, 2005). Substansi CSR dilakukan dalam rangka memperkuat *sustainability* perusahaan dengan melakukan kerja sama antar-stakeholder yang difasilitasi oleh perusahaan melalui program pengembangan masyarakat (*community development*). Oleh karena itu, laporan CSR merupakan cermin dari tingkat keberlangsungan dan bagaimana cara perusahaan menjawab perubahan ekonomi, sosial dan lingkungan di sekitarnya.

Oleh karena itu, CSR sesungguhnya merupakan salah satu upaya perusahaan dalam menunjukkan etika sosialnya dalam membangun kinerja jangka panjang.

Zadek, Fostater, dan Raynard dalam bukunya *Social Development and the Role of the Private Sector: Corporate Social Responsibility* membagi CSR ke dalam tiga generasi: dimulai dari yang sifatnya *filantropis* (*charity* atau sedekah), menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi bersaing jangka panjang perusahaan, dan yang lebih maju lagi, yang berorientasi pada advokasi dan kebijakan publik. Sedangkan Hopkins (2003) melihat CSR dari 3 aspek dalam pembangunan, yaitu (i) *Charitable*, (ii) *development inside the company that initiates new products for developing countries* dan (iii) *activities that promote sustainable development and anti-poverty initiatives*.

CSR acapkali disebut juga dengan nama lain seperti pemberian (amal) perusahaan (*corporate Giving/Charity*), kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*), relasi kemasyarakatan perusahaan (*corporate community/public relations*) dan pengembangan masyarakat (*community development*). Keempat nama itu bisa dilihat sebagai dimensi (pendekatan) CSR dalam konteks Investasi Sosial Perusahaan (*Corporate Social Investment/ Investing*) yang didorong oleh spektrum motif yang terentang dari 'amal' hingga 'pemberdayaan' (Briliant dan Rice, 1988; Burke, 1988 dan Suharto, 2006).

*Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati,*

### **Kewajiban CSR di Indonesia**

Ide tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sebetulnya sudah mulai muncul sejak tahun 2005. Hampir dua tahun ide tersebut menjadi polemik dan baru tahun 2007 CSR diwajibkan bagi perusahaan melalui revisi UU Perseroan Terbatas (PT) UU 1/1995 dalam sidang paripurna DPR tanggal 20 Juli 2007.

Dalam UU pengganti UU No 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas terdapat pasal (pasal 74 ayat 1; pasal 2, pasal 3 dan pasal 4) antara lain mewajibkan perusahaan untuk mengalokasikan dana untuk *Corporate Social Responsibility* (CSR).

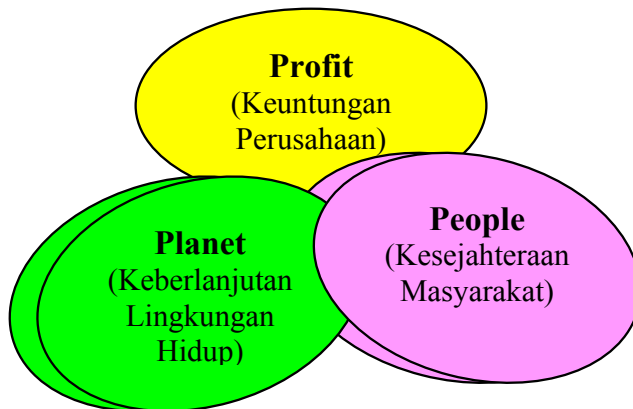
Ketentuan CSR tersebut ditujukan ke perseroan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam (SDA) dan perkebunan atau yang berkaitan dengan itu. Sementara itu, perusahaan milik negara (BUMN) sudah menerapkan CSR yang diwajibkan oleh UU 19/2003 tentang BUMN, lewat *Program Kemitraan dan Bina Lingkungan* (PKBL) yang sudah diatur secara rinci aturan pelaksanaannya. Untuk BUMN dikecualikan, alias tidak ada kewajiban CSR sebagaimana dikehendaki dalam perusahaan eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) karena sudah ada UU tersendiri.

Di saat peran negara dalam pembangunan (karena beberapa sebab) yang semakin berkurang, maka peran dunia industri justru semakin penting dan signifikan. John Perkins dalam bukunya *Confession of an Economic Hit Man* dan *A Game As Old As Empire* menunjukkan bagaimana kekuatan dan pengaruh uang MNCs jauh lebih besar dibandingkan institusi negara. Lihat misalnya dari 100 kekuatan ekonomi terbesar dunia sekarang ini, 51 adalah korporasi. Nilai penjualan 200 korporasi terbesar dunia setara dengan seperempat total produk domestik bruto (PDB) dunia. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dengan uang dan pengaruh itu, para pengusaha kaya dapat mendektekan kehendaknya kepada para politisi negara.

Dunia industri, dengan kekayaan finansial dan pengaruhnya, akan memiliki fungsi strategis dan sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun hal ini belumlah cukup; karena (dan apalagi), dalam kerangka *Tujuan Pembangunan Milenium*, posisi dan hubungan antara perusahaan dan masyarakat berdiri sejajar. Sebuah perusahaan dikatakan bagus tidak hanya dilihat dari aspek manajemen keuangan perusahaan, tetapi juga diukur dari aspek peran dan tanggung jawab sosialnya perusahaan

terhadap pengembangan kehidupan masyarakat. Untuk itu, upaya perusahaan untuk melibatkan masyarakat dalam aktifitas ekonomis adalah sebagian dari nilai-nilai etis (moral) dan praktik pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Signifikansi peran (*corporate performance*) perusahaan tidak hanya di ukur dari jumlah warga masyarakat yang direkrut bekerja di perusahaan, tetapi juga dilihat dari seberapa jauh perusahaan dapat mentransformasikan nilai-nilai manajemen perusahaan yang baik untuk dikembangkan dalam kehidupan sosial bersama masyarakat. Lebih dari itu, sering dengan *Millennium Development Goals* (MDG), perusahaan juga harus memikirkan program yang dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Sudah menjadi arus global bawah perusahaan harus berpijak pada ***triple bottom line***, yakni keuntungan, masyarakat dan lingkungan; bukan hanya berorientasi finansial semata (***single bottom line***). Orientasi pada kondisi keuangan tidaklah menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan, namun masih memerlukan dimensi sosial dan lingkungan. Banyak perusahaan yang tidak memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan, sehingga memunculkan resistensi masyarakat sekitar yang akhirnya mengganggu proses bisnis perusahaan itu sendiri.



**Gambar 1.** *Triple Bottom Lines* dalam CSR

CSR boleh jadi menjadi jawaban atas inisiatif bahwa bisnis tidak hanya berjalan demi kepentingan pemegang saham (*shareholders*) belaka, tetapi juga untuk *stakeholders*, yaitu pekerja, konsumen, pemerintah, masyarakat dan lingkungan. *Global Compact Initiative* menyebut pemahaman ini sebagai 3P (*profit, people, planet*). Meski tujuan bisnis adalah mencari laba (*profit*), namun juga harus bisa mensejahterakan orang (*people*) dan menjamin kelestarian planet ini. "CSR dapat membuat perusahaan mengaplikasikan *good corporate governance*, mematuhi regulasi dan etika (*corporate responsiveness*), menjunjung transparansi, dan memenuhi harapan *stakeholders*."

Bagaimanapun *responsibility* dalam konsep CSR merupakan salah satu prinsip dalam *good corporate government* (GCG). Tiga prinsip lainnya yang saling melengkapi adalah *fairness, transparency, dan accountability*. Prinsip *transparansi* menuntut perusahaan untuk memaparkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan praktik-praktik yang dijalankannya, terutama yang berdampak pada karyawan, masyarakat, dan lingkungan. *Akuntabilitas*, pemangku kepentingan mengharapkan perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam bidang non-finansial seperti dalam hak asasi manusia, peningkatan kapasitas, kebijakan lingkungan dan kepekaannya terhadap lingkungan sosial. Targetnya yakni membuat seluruh praktik bisnis tidak hanya bertanggung jawab secara sosial, tapi juga akuntabel dan transparan dengan membuat standar audit sosial atas praktik bisnis yang dilakukan.

*Hadirin yang saya hormati,*

CSR yang seharusnya telah terintegrasi dalam hierarki perusahaan sebagai strategi dan *policy* manajemen, tetapi masih banyak dipandang sebelah mata oleh kebanyakan pelaku bisnis di Indoneisa. Esensi dan signifikansi CSR masih belum dapat terbaca sepenuhnya oleh pelaku bisnis, sehingga CSR sendiri baru sekedar wacana.

Dimasukkannya CSR ke dalam revisi UU PT No 1/1995 sempat ditentang keras oleh para pengusaha di Indonesia dengan sejumlah alasan. Misalnya, CSR itu berhubungan dengan etika dan moral sehingga sifatnya sukarela; bukan kewajiban. Selain itu, bukankah para pengusaha itu sudah membayar pajak; mengapa harus diwajibkan melakukan CSR? Sementara, di kalangan intelektual, penentang gigih ide CSR adalah para ekonom *Smithian* (pengikut Adam Smith), termasuk ekonom terkemuka pemenang Nobel Ekonomi, Milton Friedman. Menurut dia, "bisnis adalah bisnis" (*the business of business is business*). Tanggung jawab sosial dalam pandangan Friedman, hanya ada pada individu; bukan melekat pada perusahaan. Tugas perusahaan adalah menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham. Bahkan, Friedman menyebut CSR sebagai ancaman bagi kapitalisme pasar bebas. Perusahaan yang menolak CSR seperti itu acapkali dituding sebagai egois dan serakah.

Sebagaimana dikemukakan oleh Clem Sunter dan Wayne Visser –keduanya merupakan manajer perusahaan raksasa dunia– bahwa keserakahan dan egoisme itu sudah menjadi sifat dan detak jantung kapitalisme global seperti banyak dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional dari negara maju (MNCs). Sementara itu, dalam buku *Beyond Reasonable Greed*, Sunter dan Visser menyoroti tidak bertanggung jawabnya perilaku korporat-korporat besar dalam menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat dan menjegal upaya menciptakan dunia yang lebih aman, sehat, dan gembira. "Perbedaan antara seorang diktator penjahat dan direktur (perusahaan) hanya pada caranya," ujar mereka.

*Hadirin yang terhormat,*

Berbagai studi menunjukkan bahwa perusahaan akan kesulitan dan kemudian merugi apabila masih menggunakan paradigma lama, yaitu hanya mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya

tanpa mengindahkan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Perusahaan dapat menggali potensi masyarakat lokal untuk dijadikan modal sosial perusahaan agar bisa maju dan berkembang. Konsumsi suatu produk biasanya dipengaruhi oleh citra buruk atau produk yang memperoleh liputan pers negatif, apalagi jika terjadi protes dari masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan mestinya tidak menganggap CSR sebagai suatu kewajiban yg memaksa, namun sebagai kebutuhan dan refleksi dari tuntutan masyarakat terhadap dunia usaha yang jika tidak dilakukan akan menimbulkan permasalahan sosial destruktif seperti *anarkisme*, *vandalisme*, ataupun bentuk-bentuk kegiatan *represif* lainnya dari masyarakat. Perusahaan yang melanggar etika sosial, seperti merusak lingkungan atau melakukan eksploitasi buruh, akan dihukum oleh pasar sebagaimana yang dialami oleh nama-nama perusahaan besar seperti Nike, Gap, dan Levi Strauss di industri garmen dunia. Sudah saatnya dunia usaha menjadikan program CSR sebagai kebutuhan dalam kerangka membangun sinergisitas dengan *stakeholders* sehingga apabila tidak dilakukan akan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan.

Beberapa hasil kajian, termasuk oleh ekonom terkemuka Michael Porter (*The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy*) menunjukkan adanya korelasi positif antara profit dan CSR, atau tujuan finansial dan tujuan sosial perusahaan. Perusahaan yang mencatat laba tertinggi adalah para pionir dalam CSR. Konsumen sekarang ini, selain tidak lagi bodoh, juga semakin melek dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan konsumsi mereka. Pertimbangan teknis bukan lagi faktor terpenting dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa, tetapi kian tergusur oleh faktor kualitas "sosial" (**Samhadi, Kompas, 4 Agustus 2007**).

Apa yang terjadi di Inggris tahun 2004 juga menunjukkan bahwa nilai konsumsi masyarakat yang keputusannya didasarkan pada pertimbangan etika sosial perusahaan tak kurang dari 44 miliar dollar AS. Dua pertiga dari 25.000 konsumen di 23 negara yang

disurvei *The Millennium Poll on Corporate Social Responsibility* juga menyebut tanggung jawab sosial perusahaan sebagai faktor penting keputusan konsumsi mereka. Dalam dunia di mana kesadaran konsumen semakin tinggi, perusahaan-perusahaan dipaksa untuk membenahi citra sosial mereka. Namun, sebagian lainnya muncul bukan karena "dipaksa", tetapi karena kesadaran.

Sementara itu, penelitian *Economic Intelligence Unit* (EIU) juga menunjukkan kalau 88% eksekutif perusahaan yang disurvei mengaku CSR sudah menjadi bagian sentral dan penting dalam pengambilan keputusan di perusahaan mereka. Angka ini meningkat dari 54 persen pada tahun 2000. Bahkan, beberapa lembaga, seperti Morley Fund Management, memasukkan CSR sebagai kriteria untuk akses ke pasar investasi dan pasar uang. Ada suatu pemeringkatan terhadap perusahaan berdasarkan keseriusan komitmen mereka menyangkut isu-isu sosial dan lingkungan.

**Bagaimana dengan CSR di Indonesia?** Secara formal, introduksi CSR dalam dunia industri di Indonesia baru mulai dilakukan beberapa tahun terakhir. Meski demikian, terdapat sejumlah industri di Indonesia yang sudah melakukan tanggung jawab dan kepedulian sosialnya meski belum menggunakan nama CSR; tetapi jika diperhatikan substansinya tak jauh berbeda dengan konsep CSR. Misalnya, industri tepung terigu terbesar di Indonesia (Bogasari) telah memiliki program CSR yang terintegrasi dengan strategi perusahaan, melalui pendampingan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis terigu.

Bahkan ada perusahaan di Sumatera Utara yang menilai CSR tidak terbatas pada pembangunan komunitas saja, melainkan juga mencakup segala hal yang berkaitan dengan pemihakan terhadap masyarakat, seperti rekrutmen baru dengan mengutamakan sumber daya manusia (SDM) sekitar wilayah kerja, kemitraan usaha dengan mengutamakan pengusaha lokal dan memberikan pelatihan SDM setempat agar mampu memasuki pasar kerja dan usaha regional. Bahkan, pengelolaan lingkungan untuk kelestarian lingkungan

hidup yang akan diwariskan kepada generasi penerus, peningkatan *skill* SDM di internal perusahaan dan program *good corporate* pun masuk dalam ruang lingkup CSR. Hasilnya, dana yang dikeluarkan untuk pembangunan sosial dan lingkungan perusahaan tersebut hingga 2006 menjadi nilai Rp 26 miliar, transaksi kemitraan bisnis melampaui Rp 760 miliar dan hampir 80 persen dari 1.035 karyawan adalah putra lokal.

Adalah menarik memperhatikan komitmen perusahaan-perusahaan dengan CSR sebagaimana dilakukan 2 perusahaan di atas karena setidaknya mengandung dua kepastian sekaligus, yakni pasti dikeluarkan selama ada produksi dan penjualan, serta angkanya pasti 1% dari hasil penjualan bersih. Proses penyisihan, distribusi dan pemanfaatannya pun dapat diakses dan dipantau publik karena mekanismenya dibuat sangat transparan oleh Tim akuntan (ekonom) independen. Dalam hitungan, CSR 1% dari *net sales* bisa lebih besar dari 5–10% dari profit seperti lazim dikeluarkan oleh badan usaha milik negara semisal PT Perkebunan Negara sebagai dana CD. Secara prosentase 1% boleh jadi kelihatan kecil; tetapi jika dalam bentuk nominal ternyata jumlahnya melampaui angka Rp 7 miliar per tahun.

Selain dua perusahaan di atas, kita juga bisa melihat PT. Unilever yang memiliki program CSR berupa pendampingan terhadap petani kedelai. Bagi petani kedelai, adanya program CSR telah meningkatkan kualitas produksi sekaligus menjamin kelancaran distribusi dan pasar. Sedangkan bagi perusahaan, hal ini akan menjamin pasokan bahan baku untuk setiap produksi mereka yg berbasis kedelai, seperti kecap Bango, yang telah menjadi salah satu andalan produknya. Ada kalanya program CSR perusahaan tidak mesti harus berada pada tingkat produsen dan pengembangan produk, tetapi dapat mencakup aspek-aspek lain seperti pendidikan, pelatihan dan konservasi.

Sejak beberapa tahun terakhir, ada kecenderungan semakin banyak industri yang menfokuskan CSR ke bidang pendidikan.

Program seperti ini memfokuskan bidang pendidikan bagi generasi mendatang, pengembangan kewirausahaan, pendidikan finansial, ataupun pelatihan-perlatihan. PT. Astra International Tbk, misalnya, telah membentuk Politeknik Manufaktur Astra, yang menelan dana puluhan milyar rupiah. Demikian halnya yang dilakukan HM Sampoerna yang mengembangkan pendidikan melalui *Sampoerna Foundation* dengan dana tidak kurang dari 47 miliar. Dari beberapa contoh ini, jelas kiranya jika CSR sangat bermanfaat untuk masyarakat dan dapat meningkatkan *image* perusahaan sehingga dunia usaha tidak memandang lagi CSR sebagai suatu tuntutan represif dari masyarakat, melainkan sebagai kebutuhan dunia usaha.

CSR sudah menjadi bagian dari strategi bisnis dalam upaya menambah nilai positif perusahaan di mata publik yakni *image* perusahaan. Beberapa perusahaan bahkan melihat CSR sebagai bagian dari manajemen risiko. Mengembangkan program CSR yang berkelanjutan dan berkaitan dengan bidang usaha merupakan konsekuensi mekanisme pasar. Kesadaran ini menjadi tren global seiring semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip HAM.

*Hadirin yang saya hormati,*

Masuknya aktifitas industri di dalam masyarakat, tidak selalu membawa manfaat positif bagi masyarakat, utamanya dalam hal kemandirian. Hal ini terjadi biasanya sebagai akibat dari masih banyak perusahaan tersebut yang terjebak pada konsep CSR yang parsial dan berorientasi *charity*. Aktivitas yang dilakukannya bersifat sesaat, tidak berkelanjutan, dan menempatkan masyarakat sebagai obyek untuk kepentingan perusahaan semata. Akibatnya, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan perusahaan menjadi tinggi.

Untuk itu perlu dirancang aktivitas CSR dengan metodologi *community development* agar berkelanjutan dan relevan dengan *core competence* dari perusahaan. Hanya program yang berkelanjutan (seperti *program pemberdayaan masyarakat, capacity building, dan transfer of knowledge* yang akan menguntungkan masyarakat dan akan menempatkannya sebagai subyek.

*Community Development* dalam beberapa hal, didefinisikan sebagai penguatan potensi dan peran masyarakat untuk meraih potensi individu melalui pengorganisasian kelompok masyarakat untuk bertindak secara kolektif guna mengontrol kebijakan, proyek, program, dan kebijakan dengan mengefektifkan peran individu-individu di masyarakat. Dalam konteks *Community Development* penguatan diartikan sebagai upaya penyesuaian sikap dan cita-cita antara perusahaan dan masyarakat melalui tindakan bersama dalam membentuk kehidupan yang saling memahami, memenuhi, dan memberi. Dengan demikian, *Community Development* merupakan serangkaian usaha untuk meningkatkan kapasitas perusahaan dan masyarakat dalam menciptakan solidaritas sebagai sebuah dasar hubungan sosial yang dinamis sehingga beberapa potensi dan peluang yang semula di anggap sulit dilakukan dan diwujudkan menjadi mungkin dilakukan dan dapat dinikmati berdasarkan proses pertukaran pengalaman, kemampuan, dan sumber daya masing-masing pihak.

Upaya melaksanakan dan mewujudkan *Community Development* bukan saja menuntut peran perusahaan; melainkan juga keharusan bagi masyarakat untuk melibatkan diri, baik individu maupun kelompok untuk berbagi gagasan, konsep, dan keinginan bersama perusahaan. Dalam konsep pembangunan sosial, masyarakat merupakan pelaku pertama dan utama dari "aksi sosial" dimana masyarakat mengorganisasikan diri dengan menyusun perencanaan tentang apa saja yang hendak dikerjakan berdasarkan atas kepercayaan yang tinggi terhadap sumber-sumber potensi eksisting yang di miliki bersama, mengeksplorasi, menemukan

dan merumuskan masalah dan kebutuhan-kebutuhan (baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan bersama); dan sejauh diperlukan dengan bantuan fasilitasi, teknis dan material dari perusahaan dan badan-badan pemerintah. Dengan melihat rumusan peran-andil pembangunan secara kolektif seperti itu, *Community Development* merupakan usaha-usaha yang terorganisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial yang ada dan memberdayakan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri mereka sendiri.

Harus diakui, melaksanakan CSR dengan *community development* tidaklah mudah baik secara teknis maupun strateginya. Hal yang diperlukan tidak saja ketersediaan dana, melainkan juga sumber daya-sumber daya yang cukup menguasai dan berkompetensi di bidangnya. Sulitnya, hampir semua perusahaan tidak mempunyai sumber daya yang dibutuhkan untuk itu. Artinya, program CSR dan Comdev ini memerlukan biaya yang tidak sedikit dan tenaga ahli sembarangan. Hal inilah yang dinilai perusahaan akan sangat membebani tidak saja dari segi keuangan, tetapi juga energi, SDM dan perhatian.

Secara konseptual, CSR adalah bagus, jika dijalankan dengan metodologi khusus, yakni *community development*. Meski banyak perusahaan telah semakin banyak melakukan CSR dengan serius, namun masih sangat banyak juga perusahaan yang belum melaksanakannya. Beberapa faktornya diantaranya masih banyaknya kepentingan yang ikut bermain: corporate, pemerintah, elite masyarakat, insitusi terkait dan pihak-pihak lain yang tidak sama memandang fungsi CSR untuk kepentingan rakyat. Masih banyak *corporate* yang menggunakan CSR untuk akal-akalan semata. Karena tidak terencana baik, dan jarang yang dievaluasi keberhasilannya dalam meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Kalau ada perusahaan yang sudah melakukan CSR. Namun selain masih bersifat *charity* (sedekah) atau *philanthropy*, asal-asalan, sekedar memberi sumbangan sekedarnya.

Sementara itu, catatan kritis terhadap revisi UU PT Th 1995 perlu dikemukakan disini diantaranya bahwa dalam UU tersebut disebutkan kalau pendanaan CSR diambil dari profit perusahaan. Ketentuan ini sangat rentan dimanipulasi; sebab, jika anggaran CSR bersumber dari profit sangat mungkin tidak akan ada CSR manakala perusahaan keuntungannya nol atau merugi.

Isu CSR dapat disimpulkan sebagai parameter kedekatan era kebangkitan masyarakat (*civil society*). Maka dari itu, sudah seharusnya CSR tidak hanya bergerak dalam aspek *philantropy* maupun level strategi, melainkan harus merambat naik ke tingkat kebijakan (*policy*) yg lebih makro dan reel.

Terlepas dari masih adanya kelemahan ketentuan yang ada dan kurang proporsionalnya pemahaman perusahaan dan masyarakat terhadap konsep CSR, yang jelas dan pasti *term* CSR sudah begitu memasyarakat. Sudah tentu, kondisi ini cukup menggembirakan bukan saja akan meningkatkan kontrol publik terhadap perusahaan (industri) dalam melaksanakan CSR, apalagi yang belum melaksanakan CSR; namun juga akan sangat membantu dan mempermudah menjadikan CSR sebagai instrumen strategis untuk mobilisasi gerakan pembangunan dari tataran paling bawah, *bottom-up planning* menuju kemandirian dan penguatan masyarakat: *civil society*.

*Bapak, ibu dan hadirin yang saya hormati,*

### **Civil Society**

Kian banyak perusahaan yang melaksanakan CSR secara terprogram untuk membantu meningkatkan kemandirian masyarakat melalui metodologi *community development*, sudah tentu tidak saja akan menguntungkan masyarakat, tetapi juga berdampak positif bagi perusahaan. Perusahaan tidak hanya diuntungkan secara ekonomi, melainkan juga secara sosial dan bahkan politik. Perusahaan yang telah menyandang pengakuan sebagai *corporate*

*culture* demikian itu selain menunjukkan kepekaan dan *emphaty sosial* yang tinggi, juga menyadari pentingnya mengikuti dinamika sosial masyarakat.

Masyarakat memang tidak pernah statis, melainkan selalu dinamis, berkembang dan kemudian berubah. Perubahan sosial yang terjadi mengindikasikan adanya transformasi dari *eksisting* yang semula sederhana, karena introduksi pembangunan akan segera mengalami perbesaran struktur sosial baik secara vertikal (*social gap*) maupun horisontal (*social differerntiation*). Kian melebarnya jarak sosial vertikal dan horisontal ini secara tak terelakkan menyebabkan ketidakpuasan-ketidakpuasan (*latent conflict*) baik pada tingkat individu, komunitas lokal maupun masyarakat. Situasi demikian pada prosesnya akan menghasilkan kerawanan-kerawanan terhadap terjadinya konflik yang berskalasi besar. Secara teoritik, percepatan perubahan masyarakat dapat menyebabkan kian tercerai-berainya ikatan-ikatan tradisional (*malintegration*), ketidakharmonisan sosial (*social disharmony*) dan meningkatnya hubungan konfliktual (*conflictual relations*).

Terjadinya sejumlah permasalahan sosial hingga maraknya konflik-konflik sosial yang destruktif mengindikasikan adanya ancaman terhadap ikatan-ikatan masyarakat skala lokal. Tataan lokal, sikap bijak masyarakat, sifat komunalitas dan solidaritas sosial yang kuat dan mandiri secara perlahan namun pasti kian kehilangan daya ikatnya terhadap warga. Pada konteks inilah kemudian muncul kesadaran pentingnya membangun kembali masyarakat warga (*civil society*) yang guyub, toleran, demokratis, mandiri dan penuh tanggung jawab itu.

Masyarakat warga (*civil society*) biasanya ditandai oleh adanya organisasi-organisasi kemasyarakatan (*civic groups*), institusi sosial-keagamaan yang mandiri, menguatnya semangat keberagaman (*pluralisme*), berkembangnya sikap toleransi, terbangunnya sikap saling menghormati dan menghargai, meningkatnya pemahaman

atas hak azasi manusia dan meluasnya perhatian terhadap peraturan (*rule of law*) yang ada.

Isu *Civil Society* yang sering disebut *masyarakat Madani*, *masyarakat warga*, atau *parallel Polis* itu sebetulnya kembali mengemuka dan mulai menguat sejak awal tahun 80-an, momentumnya dimulai di Eropa Timur, lantas merebak ke Uni Soviet, lalu menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk ke Indonesia.

Membangun *civil society* berarti harus bicara tentang *enlightenmen* (pencerahan, penyadaran) terhadap institusi-institusi tradisional sebagai ruang publik (*public space*) tanpa meninggalkan akar-akarnya. Sebagaimana dikemukakan Hannah Arendt dan Habermas bahwa setiap masyarakat memerlukan "ruang publik yang bebas" (*the free public sphere*) sebagai sarana memperjuangkan harga diri warga dan menjadi semacam landasan ideologis untuk membebaskan diri dari kekuasaan negara. Dalam bahasan Tocqueville *civil society* menebutnya untuk mengimbangi (*balancing force*) kekuasaan negara, meng-counter hegemoni negara dan menahan intervensi negara yang acapkali dilakukan secara berlebihan. Hal ini dapat dilakukan melalui asosiasi yang dibuat masyarakat secara bebas seperti LSM, organisasi sosial keagamaan, paguyuban, kelompok-kelompok kepentingan tingkat lokal, partai politik, ataupun organisasi-organisasi lain yang semula dibentuk negara namun berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat seperti Komnas HAM, KPK, dan seterusnya. Oleh karena itu, *civil society* selain menjadi strategi pengembangan demokrasi, dan sebagai cara pandang untuk memahami ke-umuman (*universalitas*) fenomena demokratisasi, juga menjadi visi etik yang bisa mengantisipasi terhadap kemungkinan munculnya jebakan yang merugikan pembangunan *civil society*, seperti kebebasan tanpa batas (*anarkisme*) yang justru menimbulkan *chaos*.

Sementara itu, menurut Hobbes dan Locke memandang *civil society* sebagai instrumen yang bisa menyelesaikan dan meredakan

konflik dalam masyarakat. Sedangkan Ferguson lebih melihat *civil society* sebagai alternatif memelihara tanggung jawab dan kohesi sosial (*social cohesion*) serta menghindari dimensi negatif individualisme. Dalam konteks ini, *civil society* dipahami sebagai entitas yang sarat dengan visi etis berupa rasa solider, kebersamaan dan kasih sayang antar sesama warga.

Kita mempunyai banyak institusi-institusi (baik sosial, agama, budaya, ekonomi maupun politik) baik formal maupun nonformal yang tersebar di pelosok masyarakat yang bisa menjadi dan dijadikan basis pengembangan *civil society*. Namun yang menjadi persoalan adalah kesiapan melakukan proses *enlightenment* dan kemampuan melaksanakan transformasi sosial. Lembaga-lembaga yang ada perlu mengubah atau setidaknya memperbaharui visi kelembagaanya. Misalnya, institusi agama bisa melakukan dengan mendayagunakan hukum agama (misalnya *fiqh siyasah*) atau fiqih kewarganegaraan dalam rangka membicarakan individu yang harus dihormati dalam posisinya sebagai individu. Pada tahap awal, adalah wajar kalau akan mengalami tantangan, tetapi bukankah transformasi sosial itu memang memerlukan proses. Beberapa lembaga itu misalnya adalah:

1. Lembaga sosial-keagamaan akan dapat memainkan fungsi mengontrol kekuasaan negara berdasarkan prinsip *tasharruf al-imam 'ala 'l-raiyyah manuthun bi 'l-mashlahah* (pengelolaan kekuasaan atau administrasi kepemimpinan harus ditundukkan kepada kemaslahatan bersama, *common good*) (Falakh, 1999).
2. Institusi sosial agama akan mampu memberikan inspirasi etis-universal dalam pemberdayaan masyarakat secara umum; bukan terbatas pada 'umat' nya sendiri.
3. Kerja sama antar golongan dan atau antar umat beragama selain akan sangat kondusif menciptakan keterbukaan dan toleransi, juga akan berarti mengurangi *fragmentasi* sosial.

4. Agama-agama yang ada di Indonesia akan sangat strategis melibatkan diri dalam pekerjaan *kultural-transformatif* sehingga agama akan menjadi bagian dari kekuasaan sosio-kultural yang memberi landasan bagi bekerjanya sistem politik yang demokratik (Falakh, 1999).

*Hadirin yang saya hormati,*

### **Civil Society dan Demokrasi *Komunitarian***

Masyarakat warga (*civil society*) adalah masyarakat yang demokratis. Demokrasi adalah cara atau seni "pergaulan hidup" untuk mencapai kebaikan bersama. Sebagai seni pergaulan hidup, demokrasi bisa diwujudkan dalam tataran baik prosedural maupun kultural. Demokrasi prosedural berkaitan dengan mekanisme pembuatan keputusan, penentuan pemimpin, dan artikulasi kepentingan masyarakat.

Berbeda dengan demokrasi liberal yang menempatkan kebebasan individu dan determinasi struktural-prosedural, demokrasi komunitarian merupakan sistem demokrasi pada level kultural masyarakat lokal yang berhubungan dengan budaya atau tatakrama (*fatsoen*) pergaulan kehidupan sehari-hari dalam arena masyarakat sipil, seperti tercermin dalam kultur yang toleran, terbuka, egalitarian, bertanggung jawab, *mutual trust*, kepedulian warga, kompetensi politik, dan seterusnya.

Demokrasi komunitarian lahir sebagai kritik atas demokrasi legal-liberal yang dinilai menjadi hegemoni universal yang melakukan penyeragaman praktek demokrasi prosedural di seluruh dunia. Dimana pun orang akan mengatakan bahwa demokrasi adalah kebebasan individu, pemilihan secara bebas, dan partisipasi; bukan demokrasi sebagai instrumen untuk mencapai kebersamaan secara kolektif. Tradisi komunitarian, yang peka terhadap masalah ini, memaknai demokrasi secara *partikularistik* dengan memperhatikan keragaman budaya, struktur sosial, sistem

ekonomi dan sejarah setiap lokalitas. Barber (1983) dan Walzer (1984), tokoh demokrasi komunitarian, menyatakan individualisme liberal cenderung merusak kewarganegaraan dan menafikkan *civic virtue* sehingga tidak mampu memberikan landasan yang kokoh bagi kebebasan dan kesetaraan warga dalam bingkai demokrasi komunitas.

Rakyat akan selalu berada dalam ikatan komunal (ketimbang individualistik), sehingga model demokrasi perwakilan selain akan menyebabkan *alienasi* partisipasi publik, juga tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasar publik. Demokrasi lokal di desa-desa yang komunal sangat mungkin masih menghargai otonomi individu seperti kaum liberal, namun yang dikedepankan bukannya kebebasan individu, tetapi penghargaan pada otonomi individu dan pemberian kesempatan pada setiap individu sebagai warga masyarakat untuk memaksimalkan aktualisasi diri dalam ikatan kepentingan kolektif.

Demokrasi komunitarian dibangun bersadar semangat *self-governing community*, hendak mempromosikan partisipasi publik dalam urusan publik, pemerintahan dan pembangunan di level komunitas lokal. Melampaui batasan-batasan formal, demokrasi komunitarian merekomendasikan pentingnya perluasan ruang publik, pengaktifan peran kelompok-kelompok sosial, forum warga, serta jaringan antar kelompok, yang bukan saja untuk keperluan *self-help* kelompok, tetapi juga sebagai wahana *awareness* warga, *civic engagement* dan partisipasi dalam urusan pemerintahan di tingkat lokal. Elemen-elemen komunitarian yang dinamis inilah yang memungkinkan dilakukannya berbagai kegiatan sosial, ekonomi, termasuk politik dan pembuatan keputusan berbasis komunitas (bukan segelintir elite) secara partisipatif serta memungkinkan penggalan potensi dan kreativitas individu dalam ikatan kolektif.

Model **demokrasi *deliberatif*** ini merupakan bentuk ekstrem demokrasi prosedural yang dijiwai oleh tradisi komunitarian. Demokrasi deliberatif berbeda dengan demokrasi perwakilan dan

demokrasi langsung dalam hal penentuan pemimpin dan mekanisme pembuatan keputusan. Dalam demokrasi deliberatif, mekanisme pemilihan pimpinan dan pembuatan keputusan dilakukan dengan cara partisipasi warga secara langsung, bukan melalui *voting* atau perwakilan, melainkan melalui dialog, musyawarah dan pengambilan kesepakatan. Model demokrasi seperti ini selain memungkinkan partisipasi secara luas dan menghindari terjadinya oligarki elite dalam pengambilan keputusan, juga menghindari terjadinya kompetisi individual dalam memperebutkan posisi pemimpin dalam proses pemilihan (*voting*) langsung, sehingga akan mengurangi juga praktek-praktek teror, kekerasan, *money politics*, KKN, dan seterusnya.

Sebelum mengenal lembaga-lembaga perwakilan desa dan pemilihan kepala desa secara langsung, nenek moyang desa sudah menerapkan praktek demokrasi komunitarian model deliberatif. Bentuk yang paling konkret adalah "rembug desa" dan "gotong-royong". Paling tidak demokrasi desa itu dibingkai dengan tiga tata yang dihasilkan dari "kontrak sosial" masyarakat setempat: tata krama (*fatsoen*), tata susila (etika) dan tata cara (aturan main) atau *rule of law*. Tata krama dan tata susila adalah bentuk budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesantunan, kebersamaan, dan lain-lain. Tata cara adalah sebuah mekanisme atau aturan main untuk mengelola pemerintahan, hukum waris, perkawinan, pertanian, pengairan, pembagian tanah, dan lain-lain.

Demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog dan tukar pengalaman di antara para pihak dan warganegara. Tujuannya untuk mencapai musyawarah dan mufakat berdasarkan hasil-hasil diskusi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Keterlibatan warga (*citizen engagement*) merupakan inti dari demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif berbeda dengan demokrasi perwakilan, yang menekankan

keterwakilan (*representation*), prosedur pemilihan perwakilan yang ketat, dan mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Demokrasi deliberatif mengutamakan kerja sama antar-ide dan antar pihak, sedangkan kata kunci demokrasi perwakilan adalah kompetisi antar-ide dan antar-kelompok.

Rembug desa merupakan wadah demokrasi deliberatif (permusyawaratan) desa, yang memegang kedaulatan tertinggi di atas kedudukan lurah (eksekutif). Rembug desa, yang mewadahi lurah dan perangkatnya, para tetua desa, tokoh masyarakat dan seluruh kepala keluarga, menjadi tempat bagi rakyat desa membuat keputusan secara langsung dengan mekanisme permusyawaratan (musyawarah). Basis ekonomi warga masyarakat yang relatif setara memungkinkan proses permusyawaratan (*deliberation*) berjalan dengan baik tanpa dominasi orang-orang kaya. Jika rembug desa menjadi arena deliberasi dan pembuatan keputusan yang partisipatif, maka gotong royong adalah arena *civic engagement* bagi warga desa. Gotong-royong yang dikelola secara otonom menjadi tempat bagi warga secara komunal untuk keperluan *self-help* baik privat maupun publik, menciptakan solidaritas, kebersamaan dan *mutual trust*.

Dalam prakteknya berbagai institusi lokal itu terjebak dalam rutinitas dan lebih banyak digunakan untuk keperluan *self-help* maupun basis ketahanan sosial masyarakat setempat, dan sedikit-banyak untuk membangun *mutual trust* antar anggota kelompok. RT, misalnya, secara konvensional digunakan sebagai arena untuk mobilisasi warga mengikuti gotong royong dalam proyek pembangunan fisik. Hampir tidak pernah RT digunakan untuk membicarakan secara kritis masalah pelayanan publik, anggaran desa, kinerja pemerintah desa dan BPD, penanganan konflik, dan sebagainya. Karena itu, tantangan ke depan adalah, bagaimana merevitalisasi modal sosial yang bisa berfungsi sebagai basis partisipasi publik, sebagai arena warga meningkatkan *awareness* pada persoalan pemerintahan, dan sebagai wadah kontrol masyarakat terhadap pemerintah.

*Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara yang saya hormati,*

### **Penutup: Simpulan**

Membangun dan memantapkan potensi lokal yang azasi dan *naturally*, yang melekat dalam setiap kehidupan manusia dalam suatu masyarakat adalah suatu keniscayaan. Itu adalah kehidupan sosial yang demokratis: *civil society* atau *masyarakat warga*. Berbagai paradigma, teori dan perspektif yang ada sudah cukup banyak diwacanakan dan dicoba implementasikan untuk mewujudkan *civil society* di Indonesia. Namun, sejauh ini, berbagai perspektif ataupun upaya implementatif yang ditawarkan dan dilakukan, masih belum dicapai sebagaimana diinginkan.

Di tengah kian berkurang dan melemahnya peran negara (pemerintah) dan semakin menguatnya pengaruh ekonomi industri dalam kehidupan masyarakat, maka wajar kalau kemudian dilakukan reorientasi peran industri tersebut dalam pembangunan melalui program CSR. CSR selain fungsional, fleksibel dan tidak birokratis, juga secara langsung bersentuhan dengan kepentingan *stakeholders*. Hubungan prosedural antara keduanya dapat dibangun secara sinergis dan saling menguntungkan. Untuk itu, diperlukan *metodologi community development* yang secara sosiologis diperlukan sebagai strategi dalam mengeksplorasi potensi dan kebutuhan masyarakat akar rumput (*grass-roots*) dalam menformulasikan kebutuhan dan kepentingannya dalam suatu perencanaan strategis. Dengan pola dan model demikian, maka disatu sisi masyarakat tidak saja akan terbangun dimensi organisasi sosial-politik berdasar modal sosial yang khas lokal yang dengan demikian juga akan *immune* dan berdaya tahan kuat dari setiap upaya provokasi, juga akan mampu membangun basis ekonominya sesuai dengan potensi yang ada.

Sebaliknya, pihak industri juga akan mendapat sejumlah keuntungan tidak saja secara sosial, namun juga secara ekonomi. Secara sosial, kehadiran industri akan diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga terbangun ketenangan dalam berusaha,

terbangunnya *social branding* dan pengakuan sosial (*social recognition*) dan selanjutnya juga akan memperoleh keuntungan secara ekonomi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Mengkahiri pidato ini, saya harus menyampaikan Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya hingga bisa seperti ini, menjadi guru besar, suatu jabatan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, *unpredictable*.

Sebagai manusia biasa, dari desa lagi, yang dalam kesehariannya, paling tidak ketika itu sungguh tidak kondusif baik secara struktural maupun kultural untuk membayangkan bisa kuliah di perguruan tinggi. Namun, berkat arahan dan bimbing orang tua, kemudian dapat menembus sekat dan bingkai tatanan sosial budaya yang *tersetting* begitu rupa hingga saya bisa seperti ini. Sungguh merupakan anugerah dari ilahi robbi. Untuk itu, saya sangat bersyukur kepada Allah swt yang telah memberikan Rahmat dan Berkah-Nya untuk bisa menjadi guru besar seperti ini. Sebagai tanda syukur itu, saya akan berusaha lebih meningkatkan pengabdian dan tanggung jawab sosial saya kepada warga masyarakat bangsa ini, khususnya ke almamater saya Fisip Universitas Airlangga.

Selain itu, saya harus mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu saya.

*Pertama*, kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Pendidikan nasional yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan Guru Besar dalam Bidang Sosiologi Pembangunan (*Sociologi of Development*).

*Kedua*, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Senat Akademik Universitas Airlangga atas bantuan dan kesediannya mengusulkan saya untuk dipertimbangkan bisa diangkat sebagai Guru Besar Sosiologi Pembangunan di lingkungan Universitas Airlangga.

*Ketiga*, terima kasih kepada Rektor Universitas Airlangga, **Prof. Dr. H. Fasich, Apt.**, beserta para Wakil Rektor atas kesediannya mengusulkan saya untuk diangkat menjadi Guru Besar.

*Keempat*, terima kasih kepada rekan seperjuangan, para Wakil Dekan I di Universitas Airlangga atas dorongan dan kerja samanya yang baik selama 3,5 tahun kita melakukan tugas di bidang pendidikan dan kemahasiswaan.

*Kelima*, Terima kasih kepada Dekan FISIP Universitas Airlangga, **Drs. Basis Susilo, MA** dan rekan Wakil Dekan II dan III yang telah membantu dan mendukung pengusulan Guru Besar saya.

*Keenam*, Kepada mantan Dekan FISIP Universitas Airlangga, **Prof. Soetandyo Wignjosebroto, MPA; Drs. J. Dwi Narwoko, MA; Sri Sanituti Hariadi, SH., MH; Machsun Ali, SH., MH** dan **Prof. Dr. Hotman M. Siahaan** yang selama saya menjadi dosen di FISIP telah memberikan bantuan dan fasilitas untuk menunjang kelancaran studi saya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, **Prof. Dr. H. Mohamad Amin, dr., Sp.P(K)** yang telah memberikan kesempatan saya belajar pada program doktor (S3) di Program Studi Ilmu Ilmu Sosial (Sosiologi) pada Program Pascasarjana.

Kepada teman-teman sekolega di FISIP Unair, khususnya di Departemen Sosiologi, **Prof. Dr. Hotman M. Siahaan; Prof. Dr. Ida Bagus Wirawan, SU; Dr. Daniel Theodore Sparringa, MA; Dr. Emy Susanti, MA; Dr. Subagyo Adam; Drs. Herwanto Aryo M, MA; Drs. Benny Sumbodo, M.Si; Drs. Doddy S Singgih, M.Si; Dra. Sutinah, MS; Dra. Uji Asiyah, M.Si; Drs. Bagong Suyanto, M.Si; Drs, Septi Ariadi, MA; Dra. Tuty Budi Rahayu, M.Si; Drs. Sudarso, M.Si; Karnaji, S.Sos, M.Si; Drs. Edy Hery, M.Si; Novri Susan, S.Sos, MA; Siti Mas'udah, S.Sos, M.Si** atas bantuan dan kerja sama yang baik selama ini.

*Bapak, Ibu dan para hadirin yang terhormat,*

Sesuai nasehat para guru yang bijak, khususnya bapak saya bahwa setelah berterima kasih kepada Tuhan, ada 3 orang lagi yang kamu harus berterima kasih: yakni orang tua, guru dan mertua.

Untuk itu, melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru saya, baik guru dalam lingkup pendidikan formal, non-formal maupun informal. Kepada semua guru-guru saya di sekolah, mulai dari guru di SDN Pojok I Ngantru Tulungagung sampai dengan guru-guru besar saya di Pascasarjana Universitas Airlangga dan Universitas Gadjah Mada terima kasih atas perannya dalam mengembangkan potensi kemampuan intelektualitas saya. Kepada para guru-guru saya di luar sekolah formal, baik di pesantren, madrasah ataupun di surau-surau di desa sejak saya kecil hingga SMA atas perannya membantu saya bisa membaca dan mengerti agama meski menurut saya masih terbatas. Guru informal saya, mulai dari orang tua, keluarga, tetangga, teman dan semua warga yang sempat bergaul dengan saya, dan secara khusus kepada para ulama, kyai, ustadz, *sesepuh* dan *pinisepuh*. yang telah memberikan nasehat dan bimbingan untuk (bagaimana) menjadi orang bijak, dan cara mengelola emosi dan hati sehingga bisa mengarungi hidup dan kehidupan ini secara damai dan penuh senyum.

*Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati,*

Saya bersyukur telah mendapat *dhuriyyah* bapak-ibu saya dari kakek-nenek-kakek-nenek saya. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada bapak saya, **Masyhud (alm)** dan ibu saya **Sofiah** atas semua bimbingan, arahan, jerih payah dan dorongannya yang luar biasa sehingga saya bisa berdiri di depan bapak, ibu dan Saudara-saudara di sini.

Kepada mertua saya, **KH. Abdurrahman (alm)** dan ibu mertua saya **Hj. Siti Fatimah** saya mengucapkan terima kasih telah memberikan putri tercantiknya untuk mendampingi hidup saya.

Kepada semua saudara kandung saya, **Imam Gozali, Drs. Farkhanudin, Dra. Siti Rahmah, Moh. Taufiq, Moh. Tasdiq, S.Ag, Tuhrowardi, S.Ag** dan **Moh. Idham**, terima kasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungannya.

Kepada keluarga dan saudara-saudara ipar saya, **Drs. Moh. Idris (alm), Drs. Chozin Asror, (alm)** dan keluarga; **Drs. Fadil Yusuf** dan keluarga; **Dra. Abu Aman** dan keluarg, **Zainal Arifin** dan keluarga; **Zainail Arif** dan keluarga terima kasih atas dukungan dan do'anya.

Akhirnya, secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada istri saya, **Dewi Hajar Mastrin** yang telah mendampingi saya selama 23 tahun, ikut berjuang, mendorong dan mendukung saya untuk terus maju dan maju terus hingga bisa seperti ini. Kepada kedua anak saya tercinta yang telah mendahului saya dan mamanya, *Sarwi Ruci* dan *Hudan Fu'adillah*, terima kasih nak atas pengorbananmu. Ayah dan mama yakin kalau nanda berdua sedang melambaikan tangan dan senyum bahagia melihat ayah sedang berpidato di sini. Sekali lagi, terima kasih nak.

*Wallahul muwafiq ila aqwamutthoriq*

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaeshi, Kenneth M. and Bongo Adi, *Reconstructing the corporate social responsibility construct in Utlish*. No. 37-2006 ICCSR Research Paper Series - ISSN 1479-5124.
- Arendt, Hannah, 1995. *Asal Usul Totalitarianisme*. (Jakarta: Yayasan Obor.
- Budiman, Arief, dkk, 2000. *Harapan dan Kecemasan: Menatap Arah Reformasi Indonesia*. (Yogyakarta: Bigraf Publishing).
- Burke, Edmund M, 1988. "Corporate Community Relations" dalam Gary M. Could dan Michael L. Smith (eds), *Social Work in the Workplace*. New York: Springer Publishing Co.
- Gerald Meier & Joseph Stiglitz, 2002. *Frontiers of Development Economics*.
- Human Right Watch Asia, *Indonesia Communal Violence un West Kalimantan*. Volume 9, Nomor 10 ©, 1997
- Hewitt, Cristhopher, 1996. "Consequence of Political Violence" dalam *Ethnic and Racial Stuides*. Volume 19, Number 1, Januari 1996.
- Hopkins, Michael, 2007. *Corporate Social Responsibility and International Development: Is Business the Solution?* London: Sterling, VA.
- Jill Murray, Jill, 2004. *Corporate social responsibility: an overview of principles and practices*, London: WIT 4LP.
- Gilpin, Robert, 2001. *The Nation-State in the Global Economy*.
- Manuel E. Contreras, Manuel E. Corporate Social Responsibility in the Promotion of Social Development Experience from Asia and Latin America. Wshington: Inter-American Development Bank 1300 New York Avenue, DC 20577.
- McWilliams; Abagail and Donald Siegel, *Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective*. The Academy of Management Review, Vol. 26, No. 1. (Jan., 2001), pp. 117-127.
- Porter, Michel E dan Mark R. Kramer, 2002. "The Competitive Advantage of Corporate Philantropy", dalam *Harvard Business Review*, December.

Suharto, Edi, 2006. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Williams, Cynthia A. *Corporate Social Responsibility in a Comparative Perspective*. College of Law. University of Illinois at Urbana-Champaign 504 E. Pennsylvania Ave. Champaign, IL 61820  
E-mail: [cwilliam@law.uiuc.edu](mailto:cwilliam@law.uiuc.edu)

Visser, Wayne, Dirk Matten, Manfred Pohl and Nick Tolhurst, 2007. *The A to Z Corporate Social Responsibility, A Complete Reference Guide to Concepts, Codes and Organizations*. England: John Wiley & Sons, Ltd.

<http://www.wartaekonomi.com/detail.asp?aid=8644&cid=24>.

## RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : **Prof. Dr. Musta'in, Drs., M.Si**  
NIP : 131 453 819  
Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung, 20 Januari 1960  
Agama : Islam  
Instansi : Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga  
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/IVb  
Alamat Kantor : Jl. Darmawangsa Dalam Selatan  
Telp. 031-5034015, Fax. 031-5012442  
Alamat Rumah : Perumahan Sidokare Indah Blok AH. 04, Sidoarjo  
E-mail: [mustain\\_fisip@unair.ac.id](mailto:mustain_fisip@unair.ac.id)  
[mustaemha@yahoo.com](mailto:mustaemha@yahoo.com)  
[wadsek1\\_fisip@unair.ac.id](mailto:wadsek1_fisip@unair.ac.id)  
Nama Istri : Dra. Dewi Hajar Mastrin  
Nama anak : 1. Sarwi Ruci (*alm*)  
2. Hudan Fu'adillah (*alm*)  
3. Ahmad Firmansyah

### RIWAYAT PENDIDIKAN

#### Pendidikan Dasar dan Menengah

1972 : Lulus SD Negeri Pojok I, Ngantru, Tulungagung  
1975 : Lulus SMP Negeri I Tulungagung  
1978 : Lulus SMPP/SMA Negeri Tulungagung

## **Pendidikan Tinggi**

- 1983 : Lulus Sarjana (S1) Program Studi Sosiologi FISIP  
Universitas Airlangga
- 1995 : Lulus Magister (S2) Sosiologi FISIPOL Universitas Gadjah  
Mada
- 2005 : Lulus Doktor (S3) Program Studi Ilmu Sosial Universitas  
Airlangga

## **Pendidikan Tambahan**

1. Pelatihan Metodologi Penelitian pada Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (PLPIIS), di Universitas Airlangga. 1985–1986.
2. Pelatihan Metodologi Pengabdian Masyarakat, di Universitas Sriwijaya, Palembang, 1988.
3. Pelatihan Metodologi Penelitian di Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1991.
4. Pelatihan Sosiologi Kesehatan, Pusat Antar Universitas (PAU) di Universitas Gadjah Mada. 1992.
5. Pelatihan Komputer di Universitas Sriwijaya, Palembang. 1988.
6. Pelatihan pengolahan data di Lembaga Penelitian Universitas Airlangga. 1992.
7. Pelatihan Applied Approach, Universitas Airlangga. 1991.
8. Pelatihan Penyusunan GBPP, Universitas Airlangga. 1999.

## **RIWAYAT PEKERJAAN**

- 1983–1985 : Asisten Dosen di Program Studi Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas  
Airlangga.
- 1985–1990 : Dosen (Dikti) pada Program Studi Sospol  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,  
Palembang.
- 1990–sekarang : Dosen Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik-UNAIR, Surabaya.

1997–2000 : Ketua Jurusan Sosiologi FISIP - Universitas Airlangga.  
2007–sekarang : Wakil Dekan 1

### **RIWAYAT KEPANGKATAN/JABATAN AKADEMIK**

9 April 1985 : Calon Pegawai Negeri Sipil Prodi Sosial Politik  
Fakul Hukum Unsri Palembang  
8 Agustus 1986 : Penata Muda (Gol. IIIa)/Asisten Ahli Madya  
6 Mei 1988 : Penata Muda Tk. I (Gol. IIIb)/Asisten Ahli  
28 Juni 1990 : Penata (Gol. IIIc)/Lektor Muda  
1 Oktober 1996 : Penata Tk. I (Gol. IIId)/Lektor Madya  
1 April 2000 : Pembina (Gol. IVa)/Lektor Kepala  
1 Oktober 2006 : Pembina Tk. I (Gol. IVb)/Lektor Kepala  
1 November 2008 : Guru Besar

### **RIWAYAT JABATAN MANAJEMEN DI LINGKUNGAN UNAIR**

1998–2001 : Ketua Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Airlangga.  
2005–sekarang : **Ketua Redaktur Jurnal *Dialektika***, Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga.  
2007–sekarang : **Wakil Dekan I (Pendidikan dan Kemahasiswaan)** FISIP Universitas Airlangga.

### **RIWAYAT JABATAN DI LUAR UNIVERSITAS AIRLANGGA**

1997–2001 : Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lapkesdam) PW NU Jawa Timur.  
2001–2006 : Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lapkesdam) PWNU Jawa Timur  
Ketua Lapkdem PW NU Jawa Timur

- 2002–2005 : Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
- 2004–Sekarang : Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
- 2005–2009 : Ketua Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Sidoarjo.

## **KARYA ILMIAH**

### **Ceramah, Seminar, dan Lokakarya (5 Tahun Terakhir)**

1. Ceramah "Posisi dan Peran Organisasi Keagamaan (NU) di Era Global". Pengurus Cabang NU Kediri, 2003.
2. Pemakalah "Manajemen Konflik Berdasarkan Pendekatan Nurani dan Islam Kultural". Bakesbang-Linmas Kab Situbondo, 2003.
3. Pemakalah "Manajemen Konflik". Pemkab Malang, 2003.
4. Pemakalah "Faktor Nilai Sosial-Keagamaan dalam Merekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa". Yayasan Kesatuan Bangsa Jawa Timur, 2003.
5. Pemakalah "Memahami Konflik Untuk Membangun Kearifan Lokal". Depsos Prop Jatim, 2004.
6. Narasumber "Konsultasi Publik". PPLH Lemlit Unair, 2004.
7. Narasumber "Aspek Sosial Budaya dalam Amdal". PPLH Lemlit Unair, 2004.
8. Narasumber "Faktor Sosial dan Budaya dalam Proses Amdal". PPLH ITS.
9. Narasumber "Konsultasi Publik". PPLH Lemlit Unair, 2004.
10. Narasumber "Teknik Analisis Sosial Budaya dalam Amdal". PPLH Lemlit Unair, 2004.
11. Narasumber "Aspek Sosial Budaya dalam Amdal". PPLH ITS, 2005.
12. Pemakalah "Aspek Sosial dan Budaya dalam RT RW". FT ITS dan Pemkot Surabaya, 2005.
13. Narasumber "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup". PPLH ITS, 2005.

14. Pemakalah "Analisis Pemetaan Potensi Konflik". Dinsos Propinsi Jatim, 2005.
15. Pemakalah "Strategi Penyelesaian Konflik". Dinsos Propinsi Jatim, 2005.
16. Narasumber "Metodologi Penelitian Sosial". Cakrawala Timur, 2005.
17. Pemakalah "Strategi Gerakan Buruh". DPRD Prop Jatim, 2005
18. Ceramah "Komponen Sosial dan Perencanaan Kota". FTS-ITS, 2005.
19. Pemakalah "Reorientasi Paradigma Ilmu Sosial dan Paradigma Pembangunan Menuju Kearifan Lokal". FKIP UNLAM Banjarmasin, 2005.
20. Narasumber "Metode Analisis Dampak Sosial". PPLH Unair, 2006.
21. Pemakalah "Peranan Ilmu Sosial dalam Membangun Kebijakan Lokal". APMD Yogyakarta, 2006.
22. Narasumber "Fungsi Konsultasi Publik dalam KA Amdal". PPLH Unair, 2006.
23. Narasumber "Dampak Sosial Pembangunan". PPLH ITS, 2006.
24. Narasumber "Teknik dan Analisis Dampak Sosial". PPLH Unair.
25. Narasumber "Dampak Sosial dan Ekonomi dalam Pembangunan dan Upaya Penanganannya". PPLH Lemlit Unair, 2006.
26. Ceramah "Faktor Sosial Budaya Pembangunan Kota". Jurusan Perencanaan Tata Ruang FA ITS, 2006.
27. Pemakalah "Dampak Konflik Lingkungan Hidup : Perspektif Sosial, Politik dan Budaya". Dewan Lingkungan Hidup Jawa Timur, 2006.
28. Narasumber "Aspek Sosial Budaya dalam Amdal". PPLH ITS, 2006.
29. Pemakalah "Mengontrol Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan". LPM UNESA Surabaya, 2006.
30. Narasumber "Konflik Antara negara dan Rakyat". Balitbanda Jatim, 2006.

31. Ceramah "MAHASISWA KITA: dari Gaul Bebas Hingga Free Sex? (Kebutuhan, Pelarian atautkah Gaya Hidup)". UKM Penalaran Mahasiswa Unair. BNP Jatim dan PW NU Jawa Timur, 2006.
32. Pemakalah "Signifikansi Peran NU Dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Narkoba". PMII Cabang Sidoarjo, 2006.
33. Pemakalah "Membangun Sidoarjo adalah Mensejahterakan Rakyat Sidoarjo". PMII Sidarjo, 2006.
34. Ceramah "Sosialisasi Rencana Eksplorasi Gas EMP di Terang Serasun Sumenep, Jawa Timur". PKSPL IPB dan EMP Jakarta, 2006.
35. Ceramah "Sosialisasi Rencana Pengembangan Eksplorasi Minyak Emerada-Heiss, Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur", 2006.
36. Narasumber "Fasilitasi Dialog antara Bupati, DPRD dan Warga di 3 Kecamatan Kabupaten Sidoarjo untuk Penguatan Institusi Sosial-Keagamaan, Lakpesdam NU Jawa Timur". PKSPL IPB dan EMP Jakarta, 2006.
37. Narasumber "Public Consultation RT RW Kota Banda Aceh". BRR, 2006.
38. Narasumber "Konsep-Konsep Dasar Sosiologi". PPPG Malang, 2007.
39. Narasumber "Ruang Lingkup Sosiologi". PPG Malang, 2007.
40. Pemakalah "LSM di Indonesia: Karakteristik, Strategi Gerakan dan Implikasinya Terhadap Hubungan Antara Negara, Masyarakat dan Industri". Pelindo Jawa Timur, 2007.
41. Pemakalah "Pembangunan dan Perubahan Sosial: Mengkritisi Dampak Industrialisasi dan Proses Marjinalisasi Masyarakat Lokal". Program Studi Sosiologi Fisip Unair, 2007.
42. Pemakalah "Kebijakan KBK di Perguruan Tinggi". FISIP UNSRI Palembang, 2007.
43. Pemakalah "Aspek Sosiologis dari Undang-Undang Guru dan Dosen". Unesa dan LSM, 2008.

44. Pemakalah "Peran Institusi Sosial Keagamaan (NU) terhadap penanggulangan Narkoba". PW NU Jawa Timur, 2009.
45. Pemakalah "Aspek Sosial dan Budaya dalam Penataan Kebijakan Lingkungan". Forum Peduli Lingkungan Jawa Timur, 2009.
46. Pemakalah "Strategi Gerakan Buruh Pasca Reformasi". SPSI Pasuruhan, 2009.
47. Pemakalah "Determinasi aspek Sosial dan budaya dalam Penataan Lingkungan". Dinas PU Jawa Timur, 2009.
48. Pemakalah "enatap Masa Depan Politik NU Pasca Pemilu 2009". Lakpesdam NU Cab Sidoarjo, 2009.
49. Narasumber "Problematika Tindak Kriminalitas di Kota Besar". Poltabes Surabaya 2009.

### **Penelitian 5 Tahun Terakhir**

1. Anggota Tim Perilaku Anggota DPR dalam Merespon Aspirasi Masyarakat (*Public Hearing*) di DPRD Propinsi Jatim, dan Pasuruan serta DPR Pusat, 2002.
2. Ketua Tim-Budaya Kesiapan Masyarakat Pantau Utara Jawa Timur (Gresik-Tuban) terhadap Industrialisasi: Kasus Studi Kelayakan Pembangunan Kawasan Industri di Lamongan, 2002.
3. Ketua Tim Sosial-Budaya "Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Lingkar di Kabupaten Bondowoso, 2002.
4. Ketua Tim Sosial-Budaya Studi Kelayakan Relokasi Terminal di Kabupaten Situbondo, 2002.
5. Ketua Pemetaan Potensi Institusi Sosial dan Agama di Kabupaten Sidoarjo, 2002.
6. Tim Strategi memerangi Kemiskinan di Pulau Madura, 2003.
7. Ketua Dampak Sumber Energi Gas Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Jawa Timur dan Kebutuhannya Terhadap Gas di Masa Mendatang, 2003.

8. Ketua Dampak Sosial Pembangunan Industri Polefin (TPPI) terhadap masyarakat di 2 desa, Kecamatan Jenu Kab. Tuban, 2003.
9. Ketua Pemetaan Parpol, Organisasi Profesi, LSM dan Satuan Hansip/Linmas di Kabupaten Sidoarjo, 2003.
10. Ketua Perencanaan Pengentasan Kemiskinan di Pulau Madura, 2003.
11. Ketua Studi Kelayakan Relokasi Terminal Tipe C Besuki, Situbondo, 2003.
12. Ketua *Political Tracking* Menuju Demokrasi Substantif, 2003.
13. Ketua Degradasi Moral Masyarakat Jawa Timur, 2003.
14. Mandiri Gerakan *Reclaiming* oleh Petani atas Tanah yang dikuasai PTPN XII di Malang Selatan, 2003.
15. Ketua Studi Eksplorasi tentang Kesiapan masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Pengolahan Limbah Beracun B-3, 2005.
16. Tim Sosbud Tim Amdal EMT Eksplorasi Gas Pulau Kangean, 2005.
17. Tim Sosbudek Tim Amdal *Amarada-Hess*, 2005.
18. Tim Sos Bud Faktor Sosial dan Budaya dalam Pembangunan Kawasan KAPET-MBAY di Nusa Tenggara Timur, 2005.
19. Ketua *Social Demografis Mapping* in 47 Desa at Kecamatan Kalitidu and Ngasem, Bojonegoro, Est Java, 2006.
20. Tim Studi Eksplorasi tentang Pengembangan Institusi Kepolisian di Jawa Timur, ICITAP-Mabes Polri dan Polda Jawa Timur, 2006.
21. Ketua Studi Eksplorasi *Trafficking* di Jawa Timur, Dikti-Hibah Bersaing, 2006.
22. Tim Sosial Faktor Sosial dalam Penyusunan RTRW Kota Banda Aceh, 2006.
23. Tim Sosial Budaya *Social Mapping* Kawasan Desa-Desa Batas Sosial Wilayah Kerja Chevron di Gunung Salak Bogor dan Darajat Kabupaten Garus, 2006.

24. Ketua Analisis Sosial atas Masyarakat Rentan Sosial Ekonomi di Kecamatan Ngasem dan Kalitidu, 2007.
25. Ketua Pemetaan Masyarakat Miskin yang memerlukan *Treatman* sosial ekonomi Akibat Beroperasinya Eksplorasi Minyak di Kalitidu dan Ngasem, Bojonegoro, 2008.
26. Ketua *Social Mapping* untuk *Social Engineering* Sosial Ekonomi Masyarakat Sidoarjo, 2008.
27. Ketua Studi Kemanfaatan Sosial untuk Renovasi Pasar Setono Betek Kediri, 2009.

### **Publikasi Ilmiah**

1. "Latar Belakang Sosial dan Budaya Masyarakat Sumatera Selatan yang Mendorong dan Menghambat Pelaksanaan Pembangunan di Sumatera Selatan", *Majalah Sriwijaya*, Tahun 1989.
2. "Persoalan Hubungan Buruh dan Majikan dan Perspektif Sosiologi Hukum", *Majalah Unsuri*, 1996.
3. "Perspektif Teori Mikro tentang Pemogokan Buruh di Surabaya, *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*", *Majalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga Surabaya*, 1997.
4. "Tindak Kekerasan dalam Keluarga, *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*", *Majalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga Surabaya*, 1998.
5. "Tindak Kekerasan terhadap Anak dan Upaya Penanggulangannya, *Hakiki*", Lembaga Perlindungan Anak Propinsi Jawa Timur, 1999.
6. "Kendala Struktural dan Kultural yang Dihadapi Pemda Mojokerto dalam Menegakkan Perda Tentang Semakin Maraknya Penambang Pasir di Sepanjang Sungai Brantas", *An-Nadzar*, Litbang NU, Jawa Timur, 2000.
7. "Potensi Institusi Keagamaan untuk Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo", 2002.

8. "Gerakan Rakyat di Lereng Gunung Semeru", dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Edisi Khusus, Maret 2005.
9. "Refleksi Gerakan Rakyat Lereng Gunung Semeru di Era Reformasi 1997", dalam *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Tahun XVIII, No. 2 April 2005.
10. "Gerakan Rakyat di Lereng Gunung Semeru", dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Edisi Khusus, Maret 2005.
11. "Refleksi Gerakan Rakyat Lereng Gunung Semeru di Era Reformasi 1997", dalam *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Tahun XVIII, No. 2 April 2005.
12. "Perempuan dan Politik: Perspektif Teori Sosiologi Makro Tentang Partisipasi Perempuan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik", dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Edisi Khusus, Maret 2007.

#### **Buku:**

- **Studi Kualitatif tentang Pekerja Anak di Jawa Timur**, Kerjasama Antara UNICEF, Pusat Studi Ketenagakerjaan Lembaga Penelitian UNAIR dan Bappeda TKI Propinsi Jawa Timur, 2000.
- *Peranan Agama*, dalam **Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan**. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- *Perubahan Sosial*, dalam **Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan**. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- **Gerakan Sosial dan Politik Rakyat Pasca Reformasi**, Jakarta: LP3ES, 2002.
- *Teknik Wawancara dalam Penelitian*, dalam **Metodologi Penelitian Sosial**, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- *Teknik Wawancara dalam Penelitian*, dalam **Metode Penelitian Sosial**. Surabaya: Airlangga University Press, 1997.
- *Respon Masyarakat Lokal Terhadap Eksplorasi Minyak*, dalam **Industri Migas di Jawa Timur**, Surabaya: Balitbangda Propinsi Jawa Timur, 2006.

- *Tarik Ulur Eksplorasi Minyak Blok Cepu dalam **Industri Migras di Jawa Timur***, Surabaya: Balitbangda Propinsi Jawa Timur, 2006.
- *Gerakan Perlawanan Rakyat Terhadap Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Arrusz, 2007.

